



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT II

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA REVISI
INSPEKTORAT II**

TAHUN 2021

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

JAKARTA, JULI 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II Tahun 2021 merupakan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap kinerja sekaligus bahan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

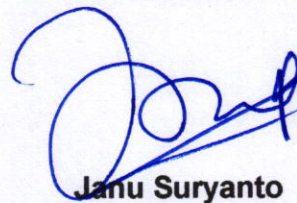
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan LAKIP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat selain sebagai pertanggungjawaban atas Pelaksanaan tugas Inspektorat II selama tahun 2021, juga sebagai informasi dalam meneruskan dan meningkatkan pengawasan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini saya selaku Inspektur II mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II pada tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, Juli 2022

INSPEKTUR II



Janu Suryanto

IKHTISAR EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang mewajibkan setiap unit kerja sebagai unsur penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Inspektorat II sebagai bagian unit kerja Inspektorat Jenderal dan sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang pengawasan, memiliki kewajiban dalam mengamankan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Unit Vertikal Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Sidoarjo.

Realisasi anggaran TA 2021 sebesar Rp. 1.499.290.381 atau 99.62% dari Pagu Anggaran Inspektorat II Rp. 1.505.000.000,- (Anggaran setelah pemotongan) dengan realisasi capaian fisik sebesar 100% berdasarkan data *Aplikasi PP39* dan *Aplikasi SAS* dengan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Ket
Perspektif Pemangku Kepentingan					
1		1. Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	1,4%	0,0551%	-
		2. Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *IKU	8%	0%	Capaian 100%
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	100%	Capaian 117%
		4. Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II	91,5%	72,3%	Capaian 80%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	5. Indek Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *IKU	Level 3	2,62	Capaian 87,33%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	85,71%	Capaian 114 %

		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%	86%	Capaian 111%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	3. Presentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa*)IKU	75%	99,05%	Capaian 132%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	85,29%	Capaian 106%
		Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	95,07%	Capaian 105%

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat II	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Cakupan Tugas	4
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis Organisasi	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	11
C. Rencana Anggaran Tahun 2021	19
D. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021	21
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Analisis Capaian Kinerja	25
B. Akuntabilitas Keuangan	59
BAB IV : PENUTUP	70
Tinjauan Umum Keberhasilan dan Permasalahan/Kendala	70
A. Keberhasilan	70
B. Permasalahan / Kendala	70
C. Upaya dan Strategi Pemecahan	70

DAFTAR TABEL

1.	Indikator Kinerja Inspektorat II Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2021 (Sebelum Perubahan)	13
2.	Indikator Kinerja Inspektorat II Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2021 (Setelah Perubahan)	15
3.	Rencana Kinerja TA. 2021	19
4.	Alokasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2021	20
5.	Perjanjian Kinerja TA. 2021	22
6.	Target dan Capaian Output Inspektorat II	24
7.	Informasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2021	37
8.	Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024	49
9.	Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat II Tahun 2020 – 2024	55
10.	Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat II Tahun 2021	59
11.	Perbandingan Realisasi Keuangan PP 39 dengan Aplikasi SAS TA. 2021	61
12.	Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kinerja dengan Indikator yang telah Ditetapkan	62
13.	Pencapaian Realisasi Keuangan Setiap Triwulan selama Tahun 2020 – 2021	64
14.	Realisasi Keuangan per Triwulan 2020 berdasarkan Data Aplikasi PP39	65
15.	Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2021 dan 2020	67

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT II

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi tersebut, Inspektorat II telah menyusun program kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2021, Inspektorat II melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2021 dan menunjang program Inspektorat

Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan Inspektorat II pada tahun 2021 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Menyempurnakan sistem dan prosedur dalam pengawasan sebagai upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat II melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Vertikal, Pengawasan Dekonsentrasi Perindustrian, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/Audit Khusus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana telah disampaikan di atas.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat II juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Reviu PIPK** di unit satker pusat dan vertikal yang menjadi cakupan tugasnya. Serta sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga, APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan PMK Nomor 78 Tahun 2019. Oleh karena itu, pada tahun 2021 Inspektorat II juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu RKAKL** terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat II agar penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai kaidah peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat II melaksanakan monitoring dan

evaluasi (Monev) kegiatan yang terbagi menjadi **Monitoring dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II**. Dalam rangka untuk melakukan pengawalan kegiatan prioritas Kementrian dan Nasional serta Pengawalan dan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam bentuk konsultasi dan pengawalan pada Unit Eselon I Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE Inspektorat II melaksanakan **Konsulting dan Pengawalan Program dan Kegiatan cakupan Tugas Inspektorat II**. Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat II melaksanakan kegiatan **Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, serta Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pengawasan**.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II dipimpin oleh seorang Inspektur, adapun struktur organisasi Inspektorat II terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

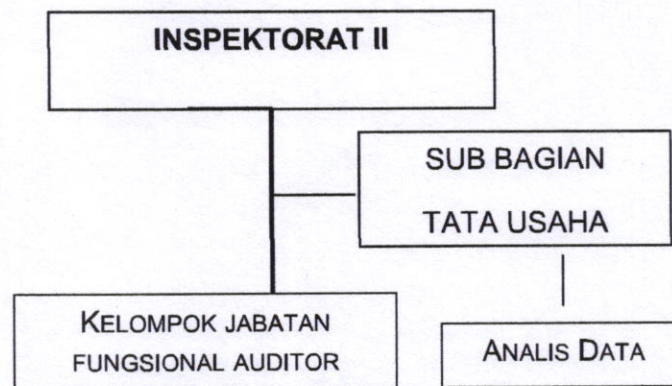
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pada tahun 2021 ini, Inspektorat II memiliki total pegawai sebanyak 18 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 15 (lima belas) orang Auditor (1 orang tugas belajar) dan 1 (satu) orang Analis evaluasi laporan.

Struktur organisasi Inspektorat II dapat dilihat sebagai berikut:



KOMPOSISI SDM INSPEKTORAT II:

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Inspektur	1
2	Kasubag Tata Usaha	1
3	Auditor Madya	2
4	Auditor Muda	6
5	Auditor Pertama	7
3	Analisis Evaluasi Laporan	1
TOTAL		17

D. CAKUPAN TUGAS

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II memiliki kewajiban melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Cakupan tugas Inspektorat II adalah sebagai berikut:

- 1 Unit Pusat, yaitu:
 - a) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
 - b) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.
2. Unit Vertikal Balai, yaitu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo; dan
3. Dinas/Satker yang menangani Perindustrian di Provinsi (Dekonsentrasi) 34 Provinsi seluruh Indonesia, Yaitu:
 - 1) Dinas Perindag Prov. Nangroe Aceh Darussalam
 - 2) Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat;
 - 3) Dinas Perindag Prov. Bengkulu;
 - 4) Dinas Perindag Prov. Sumatera Utara;
 - 5) Dinas Perindag Prov. Riau;
 - 6) Dinas Perindag Prov. Kepulauan Riau;
 - 7) Dinas Perindag Prov. Jambi;
 - 8) Dinas Perindag Prov. Sumatera Selatan
 - 9) Dinas Perindag Prov. Bangka Belitung;
 - 10) Dinas Perindag Prov. Lampung;
 - 11) Dinas Perindag Prov. DKI Jakarta;
 - 12) Dinas Perindag Prov. Banten;
 - 13) Dinas Perindag Prov. Jawa Tengah;
 - 14) Dinas Perindag Prov. DI. Yogyakarta;
 - 15) Dinas Perindag Prov. Jawa Timur;
 - 16) Dinas Perindag Prov. Jawa Barat;
 - 17) Dinas Perindag Prov. Bali;
 - 18) Dinas Perindag Prov. Nusa Tenggara Barat;
 - 19) Dinas Perindag Prov. Nusa Tenggara Timur;
 - 20) Dinas Perindag Prov. Kalimantan Utara;
 - 21) Dinas Perindag Prov. Kalimantan Barat;
 - 22) Dinas Perindag Prov. Kalimantan Tengah;
 - 23) Dinas Perindag Prov. Kalimantan Selatan;
 - 24) Dinas Perindag Prov. Kalimantan Timur;
 - 25) Dinas Perindag Prov. Gorontalo;
 - 26) Dinas Perindag Prov. Sulawesi Utara;
 - 27) Dinas Perindag Prov. Sulawesi Barat;
 - 28) Dinas Perindag Prov. Sulawesi Tengah;
 - 29) Dinas Perindag Prov. Sulawesi Tenggara;
 - 30) Dinas Perindag Prov. Sulawesi Selatan;
 - 31) Dinas Perindag Prov. Maluku Utara;

- 32) Dinas Perindag Prov. Maluku;
- 33) Dinas Perindag Prov. Papua;
- 34) Dinas Perindag Prov. Papua Barat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategis yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Inspektorat II sebagai bagian dari unit kerja Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

1. Visi

Inspektorat Jenderal sebagai bagian Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;

- h. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

3. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu **“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”** yang bercirikan:

- a. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- c. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

4. Strategi pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal untuk periode 2020-2024 juga merupakan turunan (cascading) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Kementerian Perindustrian, yaitu tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

- a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Cakupan Tugas Inspektorat II *) IKU;

- b. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker Cakupan Tugas Inspektorat II*) IKU;
- c. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU;
- d. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU.

Untuk itu telah ditetapkan sasaran pengawasan yaitu meningkatnya kinerja semua unsur Kementerian dengan terlaksananya program pembangunan serta mencegah dan menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang, kebocoran serta pemborosan keuangan negara.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Kementerian Perindustrian, telah disusun kebijakan pengawasan Kementerian Perindustrian dimana Inspektorat II merupakan bagian pelaksana kebijakan sebagai berikut:

1. Paradigma Pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan, dilaksanakan Paradigma baru pengawasan, dimana secara bertahap kegiatan pengawasan akan didorong dari Post Audit (*watch dog*) menjadi pembinaan (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*). Dengan paradigma baru tersebut ukuran keberhasilan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen unit kerja mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut meliputi aspek pengelolaan resiko, control, dan tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat membantu menangani resiko.

2. Nilai-nilai Pengawasan

Prinsip dan nilai-nilai penting yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, obyektif, independen dan akuntabel. Nilai/prinsip tersebut menjiwai pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

3. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

4. Lingkup Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan menempatkan aparat pengawas sebagai mitra kerja auditi sehingga lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh (*input, process, output, outcome, impact*), untuk memastikan bahwa :

- a. Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
- b. Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan
- c. Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

5. Kebijakan Pengawasan

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.
- b. Menerapkan audit berbasis resiko.

6. Obyek Pengawasan

Objek pengawasan Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Unit Kerja Kementerian Perindustrian baik di Pusat maupun di daerah, serta Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi. Saat ini obyek pengawasan sebanyak 37 Unit kerja, terdiri dari: Unit Pusat 2 Unit, Unit Kerja Vertikal di daerah 1 Unit, Dinas Provinsi Penerima dana Dekonsentrasi sebanyak 34 Unit.

7. Fokus Pengawasan

Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat II Inspektorat Jenderal, berfokus pada 3 (tiga) aspek pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

- a. Pengawasan Program/Kegiatan, dengan melakukan audit kesesuaian pelaksanaan program dengan RPJM, Renstra, Tupoksi, Kebijakan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dan sumber daya manusia serta sistem/prosedur kerja (SOP)
- b. Pengawasan Anggaran/Keuangan dan Barang Milik Negara, dengan mengaudit kesesuaian ketertiban pelaksanaan anggaran/keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, analisis kebutuhan BMN, Pencatatan dan Inventarisasi BMN, Sistem pengamanan terhadap penyimpanan BMN, Prosedur Penghapusan BMN.
- c. Pengawasan Pelayanan Publik, dengan Monitoring dan audit penerapan *e-licensing*, Evaluasi penerapan sistem integritas pelayanan publik dan Monitoring penerapan praktek anti korupsi.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2021 Inspektorat II memiliki program dan kegiatan melaksanakan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian** sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, dan rencana kinerja Inspektorat Jenderal. Sasaran strategis Inspektorat II adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Terwujudnya Efektifan dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II*)IKU
 - b. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II;

- c. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat II;
 - d. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cangkupan tugas Inspektorat II*)IKU
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja yaitu Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU

Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan di Inspektorat II dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan;
 - b. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK).
2. Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri dengan indikator kinerja yaitu Persentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU.
- 3.

Perspektif Kelembagaan

1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT; dan
 - b. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Pada Triwulan IV tahun 2021, terjadi beberapa perubahan pada perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal, diantaranya perubahan nomenklatur indikator kinerja dan perubahan cara pengukuran indikator kinerja. Alasan utama terjadinya perubahan adalah karena adanya Renstra Kementerian Perindustrian versi terbaru sebagaimana tertuang pada Permenperin Nomor 29 Tahun 2021. Detail perubahan perjanjian kinerja Inspektorat II dapat dilihat pada dua tabel berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Inspektorat II Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2021 (Sebelum Perubahan)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2020
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan

				yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91,5%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangkakerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut.
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%	Dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL *)

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	Menghitung tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFAterakhir yang dimiliki

Tabel 2. Indikator Kinerja Inspektorat II Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2021 (Setelah Perubahan)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2020
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun
		3. Pengaduan masyarakat berkadar		Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan

		pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91,5%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus : (SR+BSR)/total rekomendasi tahun sebelumnya (T-1)
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Indeks penerapan manajemen risiko(MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangkakerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut.
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%	Dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI. Cara ukur: Kegiatan Audit Pengawasan secara elektronik dibagi dengan total kegiatan audit pengawasan.

4. Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	1. Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU	75%	<p>Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (RP_{3DN})= $\frac{RA_{P3DN}}{TOTA_{P3DN}}$</p> <p>Keterangan:</p> <p>RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN)</p> <p>TotA_{P3DN} = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111</p>
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN			
5. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	Menghitung tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
	2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki.

Capaian Indikator kinerja di reviu secara rutin per tiga bulan melalui Laporan PP 39 Inspektorat II, setelah di evaluasi perlu adanya perubahan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal. Alasan terjadinya perubahan cara pengukuran yang terjadi pada indikator kinerja 1.4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti

oleh satker karena dianggap kurang sesuai, maka untuk mendapatkan hasil yang relevan dan telah tuntas, perhitungan rekomendasi menggunakan saldo rekomendasi 1 tahun sebelumnya (T-1). Dan pada Indikator Kinerja 3.3 Penerapan TABK juga terjadi perubahan pada metode atau aplikasi yang digunakan dalam pengukuran indikator Kemudian pada indikator kinerja 4.1 tabel 5 (sebelum revisi) terjadi perubahan dan diganti indikator kinerja berdasarkan Permenperin Nomor 29 Tahun 2021 tentang Renstra Kementerian Perindustrian yang terbaru yang disahkan pada tanggal 22 Desember 2021.

Tabel 3. Rencana Kinerja TA 2021

No	Sasaram Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	1,40	Persen
		2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	8	Persen
		3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	85	Persen
		4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91.5	Persen
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1 Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	level 3	Level
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1 Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75	Persen
		2 Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77	Persen
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU	75	Persen
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1 Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80	Persen
		2 Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90	Persen

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Inspektorat II pada tahun 2021 mempunyai Kegiatan "Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II" dengan anggaran awal sebesar Rp.2.000.000.000,- dan setelah pemotongan/penghematan menjadi sebesar Rp.1.505.000.000,- yang terdiri dari Laporan Hasil Audit Inspektorat II, Laporan Hasil Reviu Inspektorat II, Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat II, Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II dan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat II. Alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari :

Tabel 4. Alokasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2021

kode	Uraian	vol	Pagu Revisi
1842	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Inspektorat II		1.505.000.000
1842.TAK	Layanan Pengawasan Internal		1.505.000.000
1842.TAK. 001	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	4 Laporan	846.886.000
051	Audit Program dan Kegiatan Ditjen ILMATE		59.726.000
052	Audit Program dan Kegiatan Ditjen IKMA		721.994.000
053	Audit Khusus		65.166.000
1842.TAK. 002	Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	13 Laporan	64.174.000
051	Reviu LK-BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		63.174.000
A	Reviu LK-BMN		27.792.000
B	Reviu PIPK		35.382.000
052	Reviu RKA-KL Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		6.000.000
1842.TAK. 003	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	1 Laporan	6.726.000
051	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		6.726.000
1842.TAK. 004	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	1 Laporan	388.600.000
051	Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		388.600.000
A	Pengawasan Penyelesaian Hibah BMN Satker Binaan Inspektorat II		11.484.000
C	Pelaksanaan Pembinaan dan Konsultansi Dalam Rangka Peningkatan Peran Pengawasan Inspektorat II		377.176.000
1842.TAK. 005	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat II	1 Laporan	182.712.000
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran		182.712.000
A	Pengelolaan Arsip dan Ketatausahaan Inspektorat II		175.984.000
B	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Inspektorat II		3.364.000
C	Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat II		3.364.000
1842.TAK. 006	Evaluasi Kegiatan Inspektorat II	5 Laporan	10.842.000
051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas		10.842.000
A	Penyusunan Laporan PP39 (Triwulanan)		3.864.000
B	Penyusunan LAKIP Inspektorat II		3.114.000

C	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Inspektorat II	3.864.000
---	--	-----------

D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan Kinerja merupakan tekad atau janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara Inspektur II yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Inspektur Jenderal.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Namun seiring dengan berjalannya program kegiatan, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2021, sasaran Inspektorat II pada tahun 2021 berubah menjadi seperti tabel 1.

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dapat dicapai melalui:

1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian (assurance) melalui Layanan Audit Inspektorat II dan Layanan Reviu Inspektorat II.
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (consulting) melalui Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat II.
3. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif melalui layanan Reviu RKA-KL satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II.
4. Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri melalui penyusunan Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II
5. Terselenggaranya system manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien melalui layanan Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2021 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja TA 2021

No	Sasaram Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	1,40	Persen
		2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	8	Persen
		3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	85	Persen
		4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91.5	Persen
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1 Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	level 3	Level
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1 Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75	Persen
		2 Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77	Persen
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU	75	Persen
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1 Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80	Persen
		2 Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90	Persen

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat II Tahun 2021 antara lain:

- a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU;
- b. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU;
- c. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU;
- d. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal *)IKU.

Untuk melaksanakan rencana kinerja tersebut Inspektorat II pada tahun 2021 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Layanan Audit Inspektorat II:
 - a) Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal;
 - b) Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian;
 - c) Audit Khusus;
2. Layanan Reviu Inspektorat II :
 - a) Reviu Laporan Keuangan/BMN Inspektorat II pada Semester I dan II;
 - b) Reviu PIPK (Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan);
 - c) Reviu Perencanaan Anggaran (RKA-KL) pada Unit Pusat, Vertikal dan Dekonsentrasi;
3. Layanan Monitoring Dan Evaluasi Inspektorat II:
 - a) Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan (Monev WUB Dana Dekonsentrasi) ;
4. Consulting dan Pengawasan
 - a) Pengawasan Penyelesaian Hibah BMN
 - b) Pengawasan Kegiatan Prioritas Nasional
5. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II;.
6. Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II.

Tabel 6. Target dan capaian output Inspektorat II

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV
001	Audit Program Prioritas dan Program Satker Cakupan tugas Inspektorat II	4 Laporan	-	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan
002	Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satker Cakupan tugas Inspektorat II	13 Laporan	6 Laporan	-	3 Laporan	4 Laporan
003	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	-
004	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan
005	Anggaran Satker Inspektorat II	1 Laporan	-	1 Laporan	-	-
006	Evaluasi Kegiatan Inspektorat II	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II merupakan perwujudan dari pertanggung jawaban Inspektur II kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2021. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat II dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu :

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Ket
PERSSFEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II*) IKU	1,40%	0,0551%	-
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	8%	0%	Capaian 100%
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	85%	100%	Capaian 117%
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas	91,50%	73,2%	Capaian 80%

		Inspektorat II *) IKU			
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	2, 62	Capaian 87,33%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1.Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%	85,71%	Capaian 114 %
		2. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	77%	86 %	Capaian 111%
4	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU	75%	99,05%	Capaian 132%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80%	85,29%	Capaian 106%
		2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	95,07%	Capaian 105%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa beberapa capaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat II telah menunjukkan hasil dan indikasi bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan lancar meskipun sedikit ada hambatan dikarenakan pandemi Virus Covid 19. Berikut Analisis capaian indikator kinerja Inspektorat II tahun 2021:

• **PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN**

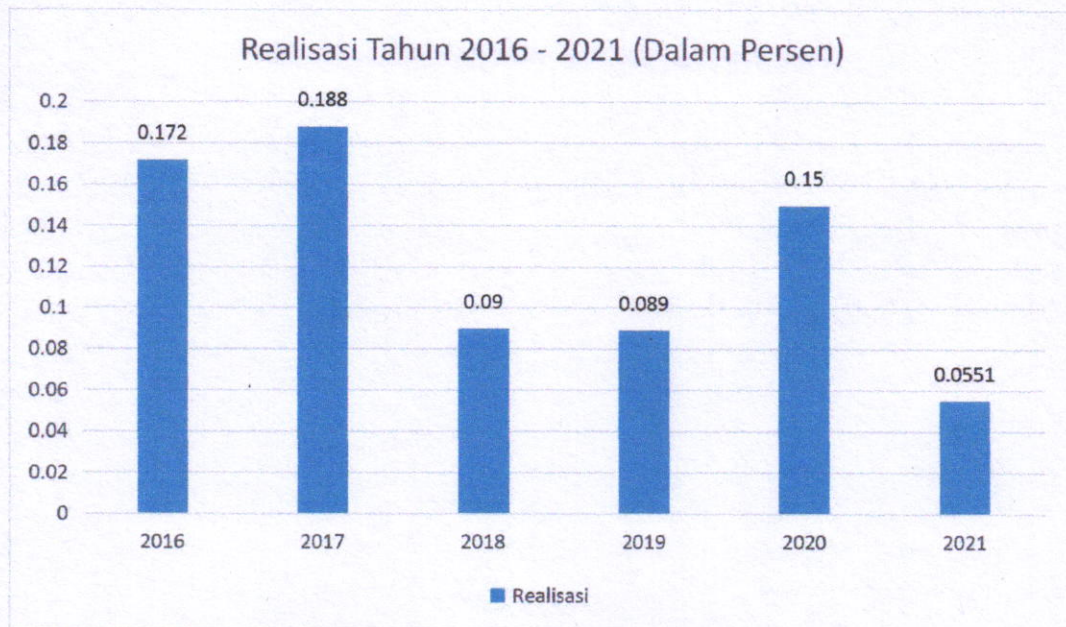
1. Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan (assurance)

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II*) IKU	1,40%	0,0551%
		b. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	8%	100%
		c. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	85%	100%
		d. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II*) IKU	91,50%	72,3%

a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II target 1,4%. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II pada Direktorat Jenderal ILMATE dan Direktorat Jenderal IKMA dengan Realisasi Anggaran Rp376.078.185.801,- Temuan BPK senilai Rp207.342.500,- maka Batas Toleransi Temuan Material adalah 0,0551%(dengan rumus Temuan BPK / realisasi anggaran belanja cakupan tugas Inspektorat II TA 2020).

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2017	R 2017	T 2018	R 2018	T 2019	R 2019	T 2020	R 2020	T 2021	R 2021
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	1. Presentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,188 %	<3 %	0,094 %	<3 %	0,089 %	<2,8 %	0,15 %	1,4%	0,0551 %



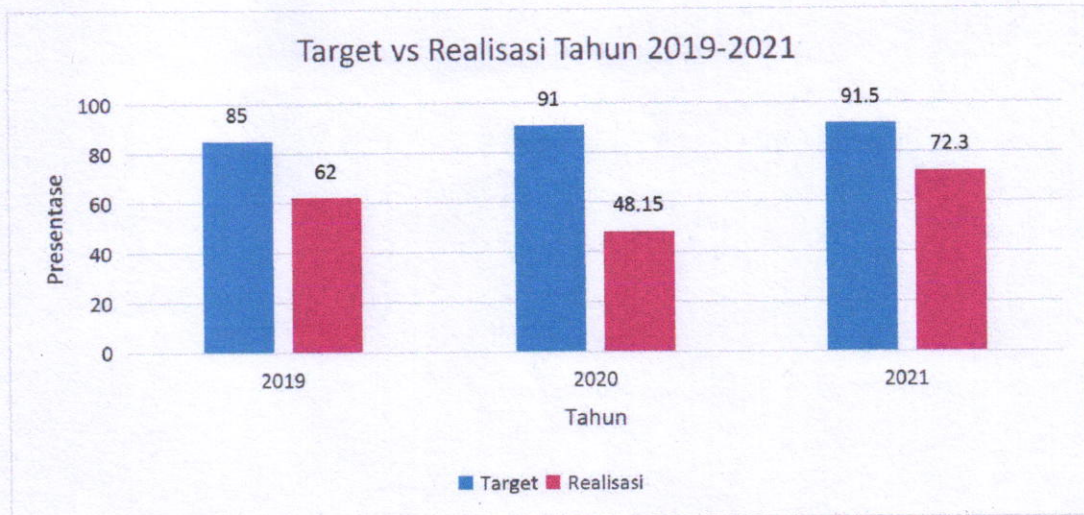
Grafik 1. Realisasi Tahun 2016-2021

- B. Maksimum Rekomendasi Hasil Pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II target 8%, realisasi capaian kinerjanya berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dilaksanakan yaitu hasil audit pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transfortasi, dan Elektronika (Ditjen ILMATE), Audit pada BPIPI Sidoarjo, audit 16 provinsi Dana Dekonsentrasi dan Audit pada Direktorat Jenderal IKMA realisasi 0% sampai dengan Triwulan IV ini (Januari-Desember) jumlah temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti (cacat temuan) tidak ada atau capaian 100%.

- c. Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 85%, Pada triwulan IV (Oktober sampai dengan Desember) cakupan tugas Inspektorat II menerima 90 pengaduan, sedangkan periode Januari s/d Desember mendapatkan 208 pengaduan masyarakat yang masuk pada Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal dari unit binaan Inspektorat II yaitu Direktorat Jenderal ILMATE, seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti, yaitu pengaduan telah disampaikan seluruhnya kepada unit yang wajib menjawabnya, sedangkan untuk pengaduan yang sifatnya umum dan pengaduan lainnya telah langsung dijawab sesuai ketentuan. Pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara *online* yang seluruhnya bersifat tidak berkadar pengawasan, realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV (Januari sampai dengan Desember) adalah 100% atau capaian 117%.
- d. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II dengan target 91,5%, realisasi capaian kerjanya sampai dengan Triwulan IV berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah dilakukan pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transfortasi, dan Elektronika (Ditjen ILMATE), Audit pada BPIPI Sidoarjo dan audit Dana Dekonsentrasi pada 16 provinsi total temuan 126 dan 148 rekomendasi adalah 73,2% atau capaian 80% (Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat II yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun belum Sesuai Rekomendasi (BSR) di bagi dengan Jumlah Total rekomendasi).

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2019-2021 sebagai berikut:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2019	R 2019	T 2020	R 2020	T 2021	R 2021
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	2. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II	85%	62%	91%	48,15%	91,5 %	73,2%



Grafik 2. Target vs Realisasi Tahun 2019-2021

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2.	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	2,62 (tidak tercapai target)

Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin dengan target Level 3, dengan hasil realisasi capaian kinerjanya pada pada tahun 2021 adalah 2,62 Indikator ini tidak memenuhi target , karena adanya perbedaan cara pengukuran sesuai dengan Perban BPKP nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intren Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah.

• PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
3.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan	a. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan	75%	85,71%%

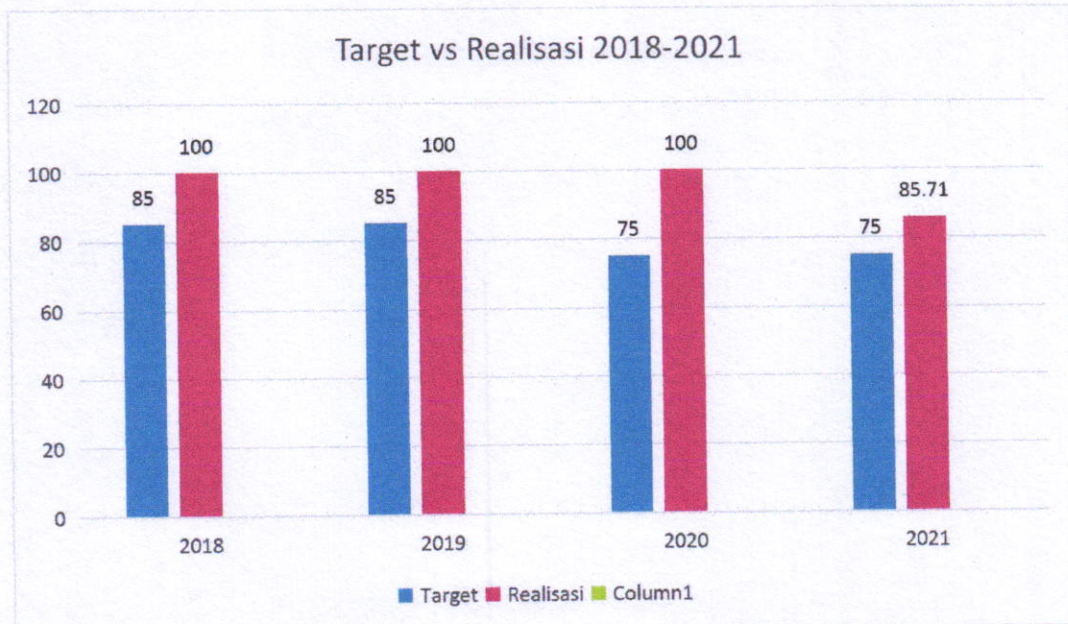
	Pengawasan Internal yang Efektif	Pengawasan di Inspektorat II dengan standar pelaksanaan pengawasan.		
		b. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komoputer)	77%	100%

- a. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan target 75%, dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal pada cakupan tugas Inspektorat II, dalam hal ini auditi. Langkah pengukuran data mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Dari perhitungan yg dilakukan secara sampling pada 3 responden, diperoleh nilai indeks kepuasan pelanggan Inspektorat II sebesar 85,71% dgn kategori kinerja unit pelayanan Baik dan Mutu pelayanan baik , realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV cakupan tugas Inspektorat II kegiatan pemantauan dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan capaian sampai dengan triwulan IV (Januari s/d Desember) adalah 85,71% dengan katagori kinerja sangat baik.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2021:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2018	R 2018	T 2019	R 2019	T 2020	R 2020	T 2021	R 2021
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan	85%	100 %	85%	100 %	75%	100 %	75%	85,71%

		pengawasan								
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Grafik 3. Target vs Realisasi Tahun 2018-2021

- B. Persentase Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 77%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan III dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dilakukan dengan menggunakan bantuan lima aplikasi berbasis komputer yaitu aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, dan RKA-K/L, namun pada triwulan IV ada revisi indikator pengukuran berdasarkan kesepakatan pimpinan dihitung melalui penggunaan aplikasi SPSE, Sipantau, SAKIP Online, PMPRB, dan PMPZI yang dipakai auditor dalam melaksanakan pengawasan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan di Inspektorat II adalah Audit pada Direktorat Jenderal ILMATE, Audit pada Direktorat Jenderal IKMA, Audit BMDTP dan Dana Dekonsentrasi. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang memenuhi 2 kriteria yaitu Aplikasi SPSE dan Sipantau adalah Audit Direktorat Jenderal ILMATE, Audit Direktorat Jenderal IKMA, dan Audit Dana dekonsentrasi Sehingga

capaian realisasi kerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari sampai dengan Desember) adalah 86% (20 dari kegiatan Audit yang sudah dilaksanakan Inspektorat II sudah menggunakan 2 dari 5 Aplikasi tersebut).

4. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat II *)IKU	75%	99,05%

Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa target 75%, Indikator Kinerja Utama hasil revisi Renstra pada akhir triwulan IV dengan indicator pengukuran berdasarkan total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun belanja barang yang ada di Inspektorat II yaitu 521211, 521811,522192,524119 senilai Rp232.490.000,- dan realisasi anggaran sampai dgn triwulan IV (Januari sampai dengan Desember) Rp230.278.899,- realisasi capaian kerjanya 99,05 % (realisasi anggaran dibagi total anggaran) atau capaian 132 %.

• PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

5. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	85,29%

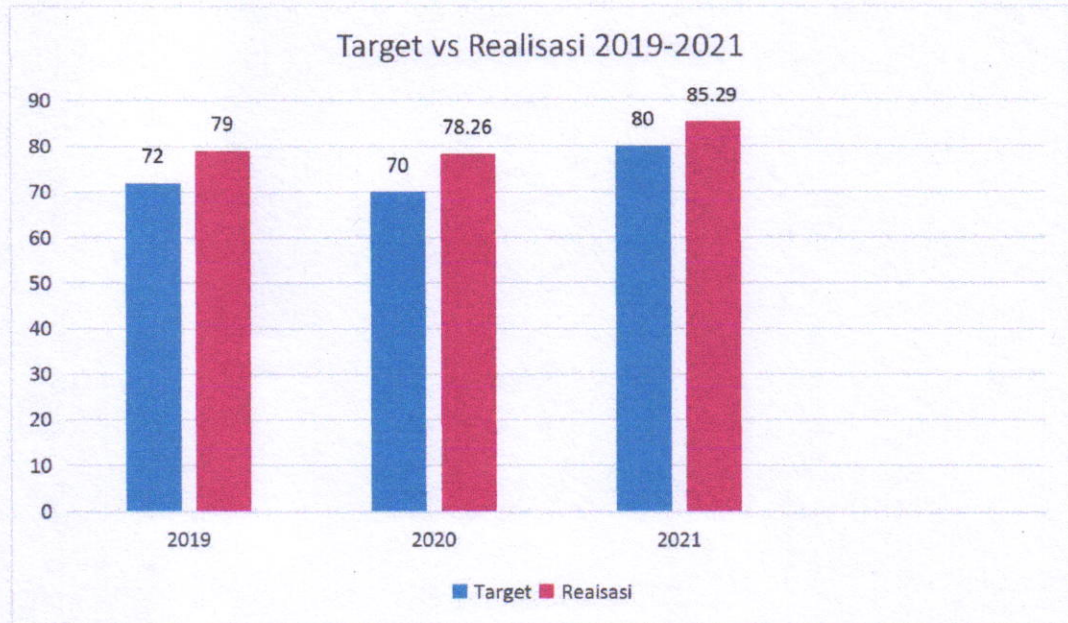
		b. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	95,07%
--	--	---	-----	--------

• **PERSPEKTIF KELEMBAGAAN**

A. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT adalah 80%, pada Triwulan III telah dilakukan revisi PKPT, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dengan PKPT yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT (kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT) pada Triwulan IV ada 7 kegiatan. Sehingga capaian realisasi kinerjanya pada Triwulan IV adalah 14,28% (dari 7 kegiatan Inspektorat II dalam PKPT yang tidak sesuai 1 kegiatan). Realisasi sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 85,29 % (dari 34 kegiatan yang ada di PKPT ada 29 kegiatan yg sesuai, dan 5 kegiatan yg tidak sesuai PKPT) atau capaian 106%.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2019-2021 sebagai berikut:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2019	R 2019	T 2020	R 2020	T 2021	R 2021
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	72%	79%	70%	78,26%	80%	85,29%

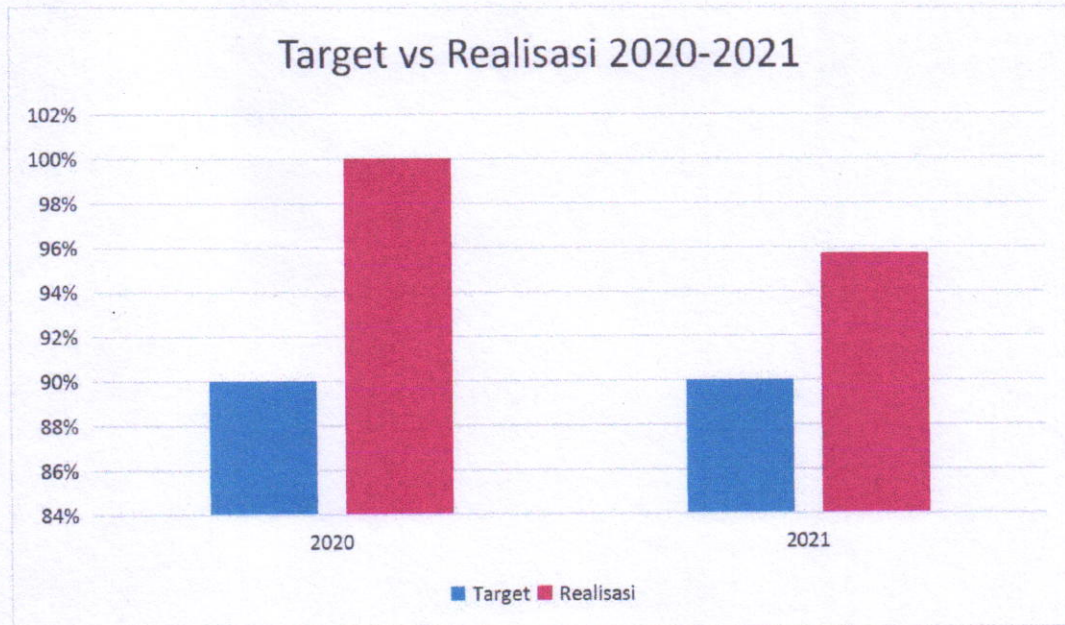


Grafik 4. Target vs Realisasi Tahun 2019-2021

- B. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 90%, Adapun tingkat kesesuaian diukur berdasarkan kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan auditor sesuai sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki. Realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV sebesar 97% (Dari 333 penugasan pada 123 kegiatan yang tidak sesuai dengan perannya ada 10). Capaian Realisasi sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) pada Kegiatan Inspektorat II sebesar 95,07% (dari 1.197 penugasan jumlah ketidaksesuaian peran penugasan ada 59).

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2020-2021 sebagai berikut:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2020	R 2020	T 2021	R 2021
2.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	100%	90%	95,07%



Grafik 5. Target vs Realisasi Tahun 2020-2021

Tabel 7. Informasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	<1,4%	-Realisasi Anggaran Cakupan Tugas Inspektorat II TA 2020: Rp376.078.185.801,- -Temuan BPK Rp207.342.500,- maka, batas toleransi temuan= $\frac{\text{temuan BPK}}{\text{realisasi Anggaran}}$ Belanja Kemenperin TA 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan (Monev WUB dan Monev DAK) - Konsultasi

				<p>jadi, batas toleransi temuan material: 0.0551%</p> <p>telah mencapai target</p>	<p>Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan penyelesaian hibah BMN - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan
		<p>Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti</p>	<p>8%</p>	<p>Hingga 31 Desember 2021, jumlah total rekomendasi yaitu 153, dan hingga saat ini belum ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. (0)</p> <p>maka, target telah tercapai, karena kinerja yang diharapkan tidak melebihi dari 8% rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja - Audit Khusus - Reviu RKAKL

		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	85%	Berdasarkan Laporan Klinik, Pengaduan yang berkadar pengawasan Bulan Januari-Desember 2021 cakupan tugas Inspektorat II, Jumlah Pengaduan yang diterima sebanyak 208 kali pengaduan, seluruhnya bersifat tidak berkadar pengawasan. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti. (100%).	Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja *)IKU	91.5%	Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal atas hasil audit Tahun 2020. Dari total rekomendasi 153 rekomendasi, Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 112. Sesuai rekomendasi 99 dan belum sesuai rekomendasi sebanyak 13. Capaian rekomendasi sebesar $112/153 \times 100\% = 73.20\%$	Pemantauan Tindak Lanjut hasil pengawasan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian TA 2020-2021 Nomor B/738/SJ-IND/KU/XI/2021 tanggal 26 November 2021. Diperoleh hasil bahwa nilai MRI Kementerian Perindustrian sebesar 2,620.	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I, II, III, IV

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Dilakukan melalui survey kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal, dalam hal ini auditi. Langkah pengukuran data mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dari perhitungan yang dilakukan 65 responden(auditi), diperoleh bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal sebesar 85,71%dengan kategori kinerja unit pelayanan Baik dan mutu pelayanan Baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Program Kerja dan Anggaran - Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya cakupan tugas Inspektorat II
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	75%	Perbandingan Pagu dan realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Inspektorat II $230.278.899/232.490.000*100\%=$ 99,05%	Berdasarkan Realisasi Akun Belanja barang di Inspektorat II yaitu 521211,521811,522192, 524119 dibagi total anggaran.

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80%	Dari 34 kegiatan yang ada di PKPT ada 29 kegiatan yg sesuai PKPT dan 5 kegiatan yang tidak sesuai PKPT realisasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar 85,29 %	Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat II
		Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan Sesuai dengan Perannya	90%	Dari 1.197 penugasan jumlah ketidaksesuaian peran penugasan ada 59, sehingga realisasi januari sampai Desember sebesar 95,07%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFAterakhir yang dimiliki

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Capaian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,188%
2	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	100 %	100% BPPI 87,41 atau AA IKTA 86,17 atau AA
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian	23 satuan kerja	23 satuan kerja

Capaian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>assurance</i>)	1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan	92%	100%
		2. Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	<3%	0,094%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (<i>consulting</i>)	1. Tingkat kematangan SPIP Satker mencapai tingkat 3	100%	100%
		2. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	100%	100% BPPI 86,95 (AA) IKTA 85,50 (AA)
		3. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani	90%	100%
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Persentase jumlah rekomendasi hasil revidu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	70%	100%
		2. Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO	2 SOP	2 SOP
4.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	1. Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	80%	90,20%

		2. Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85%	100%
--	--	---	-----	------

Capaian Kinerja Tahun 2019

NO.	SASARAN PROGRAM	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Efektifitas, Efisiensi, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	S1	Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *) IKU	95%	50%	
		S2	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas *) IKU	85%	63,64%	
		S3	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	0,089253%	
		S4	Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *) IKU	60%	100%	
		S5	Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75%	(0%)Tidak tercapai	
		S6	Persentase jumlah rekomendasi hasil revidi perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *) IKU	80%	100	
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
2	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan	T1	Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan	72%	79%	

	Internal yang efektif		Tahunan (PKPT)			
		T2	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *) IKU	85 %	100%	
PESFEKTIP KELEMBAGAAN						
3	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	L1	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50 %	100%	
4	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	L2	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai AA	Tidak tercapai target	

Capaian kinerja tahun 2020

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Ket
Perspektif Pemangku Kepentingan					
1	Terwujudnya keefektifan dan keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cangkupan Tugas Inspektorat II)	1. Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	2,8%	0,15%	Tercapai target
2. Maksimum Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan Tugas Inspektorat II		5%	100%	Tercapai target	
3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II		80%	100%	Tercapai target	
4. Rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II)*IKU		80%	48,15%	Tidak tercapai target	

2	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja cangkupan Tugas Inspektorat II yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Cangkupan Tugas Inspektorat II*IKU	3,6	100%	Tercapai Target
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3	Terselenggaranya Pengendalian Pengawasan Internal yang efektif	1. Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan di Inspektorat II dengan standar pelaksanaan Pengawasan	75%	97,2%	Pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan standar pengawasan
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	100%	Dari 3 kegiatan audit yang sudah dilaksanakan Inspektorat II
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	78,26%	16 dari 23 Jenis kegiatan Inspektorat II dalam PKPT
		2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	100%	Dari kegiatan pengawasan yg telah dilakukan semua sesuai dengan perannya

Capaian kinerja tahun 2021

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Ket
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	1,40%	0,0551%	
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	8%	0%	Capaian 100%
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	85%	100%	Capaian 117%
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91,50%	72,3%	Capaian 80%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian*)IKU	Level 3	2,62	Capaian 87,33%
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL					

3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%	85,71%	Capaian 114 %
		2. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	77%	86 %	Capaian 111%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	75%	99,05%	Capaian 132%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80%	85,29%	Capaian 106%
		2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	95,07%	Capaian 105%

Tabel 8. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU	Satuan	Target					Output Berdasarkan korelasi peta strategis dan pohon kinerja	Alokasi (Dalam Miliar Rupiah)					Aktifitas utama
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	Peningkatan Pengawasan dan akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II								1,211	8,325	8,325	8,325	8,325	
	Perspektif Pemangku Kepentingan													
SK 1	Terwujudnya keefektifan dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian													
1	Batas Toleransi temuan material Pengawasan external pada cakupan tugas Inspektorat II)*IKU	Persentase	1,5%	1,4%	1,3%	1,2%	1%	Layanan Audit Internal	0,249	1,139	1,139	1,139	1,139	-Audit Kinerja -Audit Khusus -Revlu RKAKL
								Monitoring dan evaluasi kebijakan, Industri Cangkupan	0,307	3,142	3,142	3,142	3,142	-Monitoring dan evaluasi SAKIP satuan

													kerja cangkupan tugas Inspektorat II, Monitoring dan evaluasi kebijakan Industri dan tata Kelola		
													keperintahan sesuai kebijakan pengawasan(M onev WUB dan Monev DAK)		
									Consulting Keg. Beresiko Tinggi cangkupan Inspektor II	0,271	0,783	0,783	0,783	0,783	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Beresiko Tinggi Pengawasan Penyelesaian Hibah BMN

									Reviu laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cangkupan Inspektorat II	0.133	0.318	0.318	0.318	0.318	Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan Kerja cangkupan Inspektorat II, Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
	2	Maksimum Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cangkupan Tugas Inspektorat II	Persen	10%	8%	6%	4%	2%	Layanan Audit Internal	Sama dengan SK1.1					-Audit Kinerja -Audit Khusus -Reviu RKAKL
	3	Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cangkupan tugas Inspektorat II	Persen	80%	85%	90%	95%	100%	Layanan Audit Internal	0	0,114	0,114	0,114	0,114	Pengawasan sebagai tindak lanjut
	4	Rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cangkupan tugas Inspektorat II)*IKU	Persen	91%	91,5 %	92%	92,5%	93%	Layanan Audit Internal	0,012	0,521	0,521	0,521	0,521	-Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan

SK2	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja cangkupan Tugas Inspektorat II yang baik														
	1	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)JKU	Level	3	3	3	4	4	Consulting keg. Beresiko tinggi cangkupan tugas inspektorat II	0	0.900	0.900	0.900	0.900	Konsultasi Penyusunan Peta Resiko Satuan Kerja Cangkupan tugas Inspektirat II
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL															
SK3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif														
	1	Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan di Inspektorat II dengan standar pelaksanaan Pengawasan	Persentase	75%	75%	80%	80%	85%	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	0,239	1,409	1,409	1,409	1,409	-Penyusunan Program kerjadan anggaran -Penyusunan dokumen evaluasi dan akuntabilitas
	2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	Presentase	76 %	77%	78%	79%	80%	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II						
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa														

	Dalam Negeri														
	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU	Persentase	Belum ada	75%	80%	85%	90%							
PERSEPEKTIF KELEMBAGAAN															
	SK5	Terwujudnya system manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien													
	1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	Persentase	70%	80%	90%	100%	100%	Manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat II	Sd SK 3.1	- Penyusunan Program Kerja Anggaran - Penyusunan dokumen evaluasi dan akuntabilitas -Koordinasi peran pengawasan lainnya cakupan tugas Inspektorat II	Manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat II	Sd SK 3.1	- Penyusunan Program Kerja Anggaran - Penyusunan dokumen evaluasi dan akuntabilitas -Koordinasi peran pengawasan lainnya cakupan tugas Inspektorat II	Manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat II

	2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persentase	80%	90%	100%	100%	100%	Manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat II			Manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat II			Manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat II

**Tabel 9. REALISASI SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
INSPEKTORAT II TAHUN 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Satuan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II												
Stakeholders Perspective												
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I											
	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	1.5%	1.4%	1.3%	1.2%	1%	0.035%	0.033%			
	2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai Cakupan Tugas Inspektorat II	Persen	10%	8%	6%	4%	2%	0%	0%			
	3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%			

	4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	91%	91.5%	92%	92.5%	93%	48.15%	72.3%			
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II Yang Baik												
	1	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat II	Level	3	3	3	4	4	Ditjen IKMA 3,8 dan Ditjen ILMATE 3,640	2.62			
Internal Process Perspective													
SK3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif												
	1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan di Inspektorat II dengan standar pelaksanaan pengawasan	Persen	75%	75%	80%	80%	85%	97.20%	87.5%			

	2	Penerepan Teknik Audit berbasis komputer								86%			
SK4		Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri											
	1	Presentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa *)IKU	Persen	-	-	80%	85%	90%	-	99.05%			
Learn And Growth Perspective													
SK4		Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien											
	1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	Persen	70%	80%	90%	100%	100%	78.26%	85,29			
	2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya											

Capaian Kinerja Inspektorat II yang dibandingkan dengan target nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020 - 2024 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	Target 2024
6. Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Salip ≥ B:				
		1. Kementerian/Lembaga (%)	92,77 (2018)	100
		2. Provinsi (%)	94,12 (2018)	100
		3. Kabupaten/Kota (%)	46,85 (2018)	80
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Global Fire Power Index	0,28	0,20
		2. Global Terrorism Index	5,07	4,24
		3. Proporsi orang yang merasa aman berjalan Sendirian (%)	53,32 (2017)	>60
		4. Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	N/A*	8,4
		5. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	38,24 (2018)	37,80
		6. Indeks Risiko Terorisme (target)	54,46 (2018)	54,00
		7. Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara	382	<150
		8. Angka Kejadian Konflik	60	35
		9. Angka Korban Pengungsi Internal	16.000 (2018)	14.000
		10. Terpenuhinya Minimum Essential Force (MEF) (%)	68,9	100
		11. Kontribusi Industri Pertahanan terhadap Pemerintahan Alutsista (%)	41,9	250
		12. Angka Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di Laut	300	202
		13. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)	1,8	1,69
		14. Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 Penduduk)	113 (2018)	111
		15. Pelayanan Publik Polri yang Prima (%)	61	65
		16. Skor Global Cyber Security Index	0,776 (2018)	0,838

(*pembaruan metode perhitungan pada tahun 2020-2024)

Dimana capaian kinerja Inspektorat II Tahun 2021 sesuai dengan target yang tertuang di RPJMN 2020 – 2024 adalah :

6. Target dalam RPJMN untuk sasaran Persentase instansi Pemerintah (K/L; provinsi; kab/kota) yang akuntabel (Skor atas SAKIP kategori "B" keatas) (%) dengan capaian nilai SAKIP untuk unit binaan Inspektorat II Tahun 2020 yaitu,

Direktorat Jenderal ILMATE mendapat nilai 80,56 (A) dan Direktorat Jenderal IKMA mendapat nilai 81,06 (A);

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran TA 2021 sebesar Rp. 1.499.290.381 atau 99,62% dari Pagu Anggaran Inspektorat II Rp. 1.505.000.000,- (Anggaran setelah pemotongan) dengan realisasi capaian fisik sebesar 100% berdasarkan data *Aplikasi PP39*. Pada saat penyusunan laporan tidak terdapat perbedaan realisasi keuangan antara data dari *aplikasi PP39* dengan *Aplikasi SAS*, sesuai *Aplikasi SAS* realisasi anggaran mencapai Rp1.499.290.381,- atau 99,62%. Tidak ada perbedaan realisasi anggaran aplikasi PP39 dibandingkan dengan realisasi *Aplikasi SAS*. Realisasi anggaran tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,18%.

Tabel 10. Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat II Tahun 2021

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI		SISA	REAL. FISIK
				TOTAL	%		
1842	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	2.000.000.000	1.505.000.000	1.499.290.381	99,62	5.709.619	100%
1842.TAK.001	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	972.926.000	846.886.000	843.919.603	99,65	2.966.397	100%
051	Audit Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	109.168.000	69.174.000	68.714.892	99,34	459.108	100%
052	Audit Program dan Kegiatan Direktorat	797.317.000	721.994.000	719.881.224	99,70	2.112.776	100%

	Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka						
053	Audit Khusus	66.441.000	65.166.000	64.539.619	99.03	626.381	100%
1842.TAK.002	Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	93.396.000	69.174.000	68.714.892	99.34	459.108	100%
051	Reviu LK-BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	83.912.000	63.174.000	62.735.692	99.30	438.308	100%
052	Reviu RKA-KL Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	9.484.000	6.000.000	5.979.200	99.65	20.800	100%
1842.TAK.003	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	8.468.000	6.726.000	6.692.600	99.50	33.400	100%
1842.TAK.004	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	701.634.000	388.660.000	388.368.431	99.92	291.569	100%
1842.TAK.005	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat II	175.556.000	182.712.000	180.778.705	98.94	1.933.295	100%
1842.TAK.006	Evaluasi Kegiatan Inspektorat II	48.020.000	10.842.000	10.816.150	99.76	25.850	100%

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Keuangan PP 39 dengan Aplikasi SAS TA 2021

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	Pagu Revisi	Realisasi Aplikasi SAS		Realisasi PP 39	
				TOTAL	%	TOTAL	%
1842	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	2.000.000.000	1.505.000.000	1.499.290.381	99.62	1.499.290.381	99.62
1842.TAK.001	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	972.926.000	846.886.000	843.919.603	99.65	843.919.603	99.65
1842.TAK.002	Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	93.396.000	69.174.000	68.714.892	99.34	68.714.892	99.34
1842.TAK.003	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	8.468.000	6.726.000	6.692.600	99.50	6.692.600	99.50
1842.TAK.004	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	701.634.000	388.660.000	388.368.431	99.92	388.368.431	99.92
1842.TAK.005	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat II	175.556.000	182.712.000	180.778.705	98.94	180.778.705	98.94
1842.TAK.006	Evaluasi Kegiatan Inspektorat II	48.020.000	10.842.000	10.816.150	99.76	10.816.150	99.76
	TOTAL	2.000.000.000	1.505.000.000	1.499.290.381	99.62	1.499.290.381	99.62

Tabel 12. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kinerja Dengan Indikator Yang Telah Ditetapkan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kegiatan	Anggaran (Pagu Revisi)	Realisasi	%
Perspektif Pemangku Kepentingan								
1.	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	1,40%	0,033%	-Audit Kinerja pada Ditjen IKMA dan ILMATE -Audit BMDTP -Monev WUB -Pengawasan Triwulanan -Reviu LK/BMN, RKA KL, PIPK -Monev SAKIP -Monev Hibah BMN	922.786.000	919.327.095	99,62
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	8%	0%	-	-	-	-
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	85%	100%	-Peningkatan Peran Pengawasan lain	388.660.000	388.368.431	99,92
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91,50%	72,3%	-Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Ditjen IKMA dan ILMATE	-	-	-
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	5. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	2,62%	-	-	-	-

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL								
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat Ildengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%	87.5%	-Penyusunan Dokumen Akuntabilitas	10.842.000	10.816.150	-
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%	86%	-	-	-	-
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	75%	99.05	-Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun belanja barang Inspektorat 2	232.490.000	230.778.899	99.05 %
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN								
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80%	85.29%	-Penyusunan program kerja dan anggaran -Penyusunan dokumen evaluasi dan akuntabilitas	182.712.000	180.778.705	98.94
		2.Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	95.07%	-	-	-	-

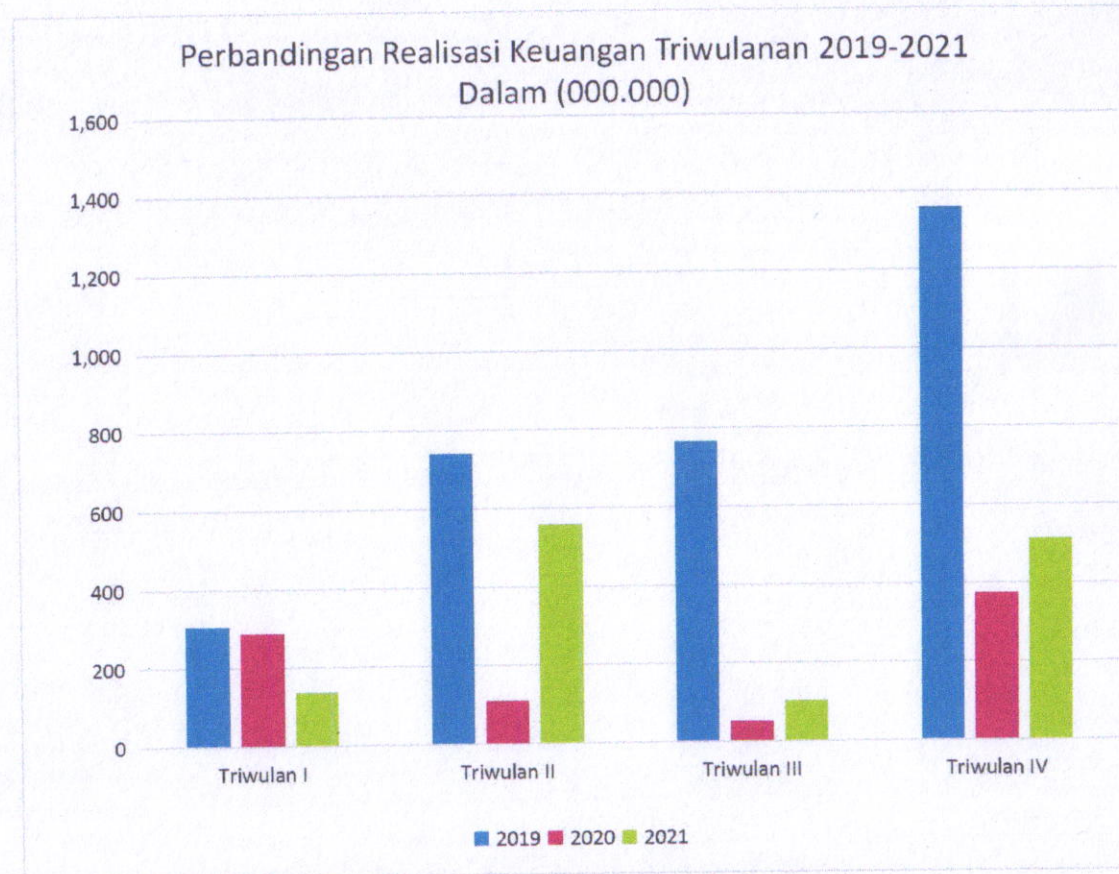
Tabel 13. Pencapaian realisasi keuangan setiap triwulan selama tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:

Realisasi Keuangan per Triwulan 2021 berdasarkan Data Aplikasi PP39

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	846.886.000	58.973.760	397.425.811	220.445.172	153.973.260	843,919,603	99.65
2	Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	69.174.000	54.749.642	-	2.389.750	11.575.500	68,714,892	99.34
3	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	6.726.000	3.297.600	1.587.000	-	1.808.000	6,692,600	99.50
4	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	388.660.000	10.821.108	89.743.506	10.195.900	277.607.317	388,368,431	99.92
5	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat II	182.712.000	6.538.800	67.351.400	44.191.600	62.316.905	180,778,705	98.94
6	Evaluasi Kegiatan Inspektorat II	10.842.000	2.460.200	2.162.350	1.560.200	4.633.400	10,816,150	99.76
	TOTAL	1.505.000.000	136.864.000	558.270.067	103.961.000	511.914.382	1,499,290,381	99.62

Tabel 14. Realisasi Keuangan per Triwulan 2020 berdasarkan Data Aplikasi PP39

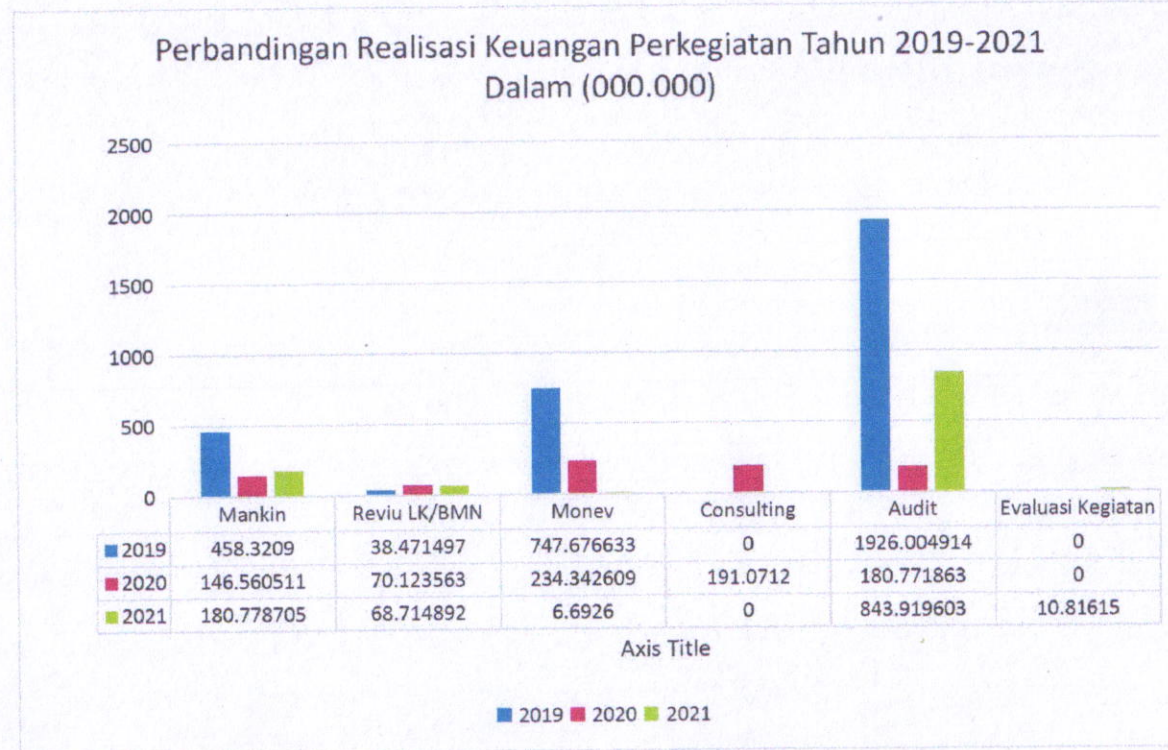
No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi				Total	% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Menejemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	176.218.000	67.111.311	22.943.512	10.067.917	46.437.771	146.560.511	83.17
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II	71.745.000	67.721.826	-	-	2.401.737	70.123.563	97.74
3	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	258.115.000	-	981.661	2.398.338	230.962.610	234.342.609	90.79
4	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II	209.439.000	58.562.066	14.686.182	34.838.401	82.984.551	191.071.200	91.23
5	Layanan Audit Internal	242.875.000	94.662.122	71.657.690	3.464.029	10.988.022	180.771.863	74.43
	TOTAL	958.392.000	288.057.325	110.269.045	50.768.685	373.774.691	822.869.746	85.86



GRAFIK 5. REALISASI KEUANGAN TRIWULANAN TAHUN 2019-2020

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2021 dan 2020

No	Program/Kegiatan	Pagu			Realisasi Total		
		2021	2020	Perbedaan	2021	2020	Perbedaan
1	Menejemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	182.712.000	176.218.000	6.494.000	180.778.705	146.560.511	34.218.194
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II	69.174.000	71.745.000	(2.571.000)	68.714.892	70.123.563	(1.408.671)
3	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	6.726.000	258.115.000	(251.389.000)	6.692.600	234.342.609	(227.650.009)
4	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II	388.660.000	209.439.000	179.221.000	388.368.431	191.071.200	197.297.231
5	Layanan Audit Internal	846.886.000	242.875.000	604.011.000	843.919.603	180.771.863	663.147.740
6	Evaluasi Kegiatan Inspektorat II	10.842.000	-	10.842.000	10.816.150	-	10.816.150
	Total	1.505.000.000	958.392.000	546.608.000	1.499.290.381	822.869.744	676.420.635



GRAFIK 6. REALISASI KEUANGAN PERKEGIATAN TAHUN 2019-2021

Berdasarkan perhitungan *Aplikasi SAS*, pada realisasi keuangan tahun 2021 terdapat kenaikan/Penurunan anggaran sebagai berikut :

1. Program/ kegiatan Menejemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II.
Pada program/kegiatan ini terjadi Kenaikan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2020) yaitu sekitar 3.69% (Rp6.494.000,-).
2. Program/ kegiatan Hasil Reviu Inspektorat II.
Pada Program/kegiatan ini terjadi penurunan anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2020) yaitu sekitar 3,58% (Rp2.571.000,-).
3. Program/ kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II.
Pada program/kegiatan ini terjadi penurunan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2020) yaitu sekitar 97,39% (Rp251.389.000,-).
4. Counsalting kegiatan berisiko tinggi cakupan tugas Inspektorat II
Pada program/kegiatan ini terjadi Kenaikan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2020) yaitu sekitar 85,57% (Rp179.221.000,-).
5. Program/ kegiatan Hasil Audit Inspektorat II.
Pada program/kegiatan ini terjadi kenaikan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2019) yaitu sekitar 248,69% (Rp604.011.000,-).

Pada tahun anggaran 2021 tidak ada perbedaan antara realisasi pada aplikasi PP39 dengan *aplikasi SAS*. Berdasarkan realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar 97,44% dan pada tahun anggaran 2021 sebesar 99,62% ada peningkatan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,18%

BAB IV PENUTUP

TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN/KENDALA

A. KEBERHASILAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat II tahun 2021, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat II tahun 2021 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya Kegiatan Inspektorat II dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat II dalam tahun 2021 telah berjalan dengan baik sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat II tahun 2021 yaitu Pelaksanaan kegiatan Inspektorat II pada Tahun Anggaran 2021 mengalami kendala yang cukup berarti dimana adanya pandemi COVID 19, anggaran Inspektorat II TA 2021 sebesar Rp.2.000.000.000,- dan adanya penghematan anggaran Inspektorat II sebesar Rp.495.000.000,- sehingga Pagu Inspektorat II Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp. 1.505.000.000,- selain itu juga terjadi perubahan pola kerja dari work from office (WFO) ke work from home (WFH) sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) perlu di revisi, untuk realisasi kegiatan pengawasan kurang optimal mengingat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi kegiatan perjalanan dinas keluar kota, dan adanya penyesuaian jadwal karena ada kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :


1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Itjen dan melakukan penyesuaian PKPT terhadap jadwal pengawasan yang dilakukan untuk tahun anggaran 2021.

2. Melakukan perubahan/revisi terhadap anggaran yang tidak dapat terlaksana sehingga fungsi pengawasan menjadi lebih optimal.
3. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Itjen terhadap permasalahan realisasi keuangan di tahun 2021 agar tidak terulang kembali.
4. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk segera mengatasi hambatan penginputan SPTJB pada tahun Anggaran 2021.
5. Berkoordinasi dengan Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan untuk segera mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan pada tahun Anggaran 2021.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun anggaran 2021 ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian.

Jakarta, Juli 2022

Inspektur II



Janu Suryanto